

Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Baubau Pasca Pandemi COVID-19 Menggunakan Pendekatan SWOT

Penulis:

La Ode Adrian
Ramadhan¹

Afiliasi:

Institut Pemerintahan
Dalam Negeri¹

Korespondensi:

adrianramadan37@gm
ail.com

Histori Naskah:

Submit: 06-06-2025
Accepted: 11-06-2025
Published: 15-08-2025

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Baubau setelah pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan SWOT. Data yang digunakan merupakan data sekunder resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau, di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 tercatat sebesar Rp124,1 miliar atau 99,82% dari target Rp124,4 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak daerah terealisasi sebesar Rp37 miliar atau 82,35% dari target Rp45 miliar, sedangkan retribusi daerah hanya mencapai Rp6,4 miliar atau 61,09% dari target Rp10,5 miliar. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama Kota Baubau adalah posisi strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara kelemahan terletak pada rendahnya tingkat pencapaian target pajak dan retribusi daerah. Peluang optimalisasi didukung oleh modernisasi pelayanan pajak berbasis teknologi informasi dan potensi perluasan basis pajak, sedangkan ancaman utama berasal dari dampak ekonomi pasca pandemi dan perubahan regulasi fiskal nasional. Hasil penelitian merekomendasikan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak, penguatan koordinasi antar-instansi, serta pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal Kota Baubau pasca pandemi COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, Kota Baubau, Optimalisasi, Pajak Daerah, SWOT

Pendahuluan

Pajak daerah memegang peranan krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung kemandirian fiskal Kota Baubau. Setelah pandemi COVID-19 menerpa, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi imperatif untuk memulihkan kondisi ekonomi dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau, pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi sebesar 1,75% pada tahun 2021. Realisasi PAD tahun 2024 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp37 miliar dari target Rp45 miliar, atau sekitar 82,35%. Angka ini mengindikasikan adanya disparitas yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, terutama jika dibandingkan dengan kontribusi sektor unggulan daerah seperti perikanan dan pariwisata yang belum optimal dalam memberikan dampak fiskal.

Identifikasi masalah utama dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Baubau memerlukan penelaahan mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan. Studi yang dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dengan persentase wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan hanya mencapai 65%. Selain itu, sistem administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi menyebabkan inefisiensi dalam proses pemungutan dan pengawasan pajak. Temuan lain mengungkapkan bahwa sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat masih terbatas, sehingga kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Tantangan ini diperparah dengan adanya perubahan regulasi perpajakan yang dinamis, yang memerlukan adaptasi cepat dari pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Baubau pasca pandemi COVID-19 melalui pendekatan SWOT. Analisis ini akan mengidentifikasi kekuatan internal (Strengths) seperti potensi sumber daya alam dan demografi, kelemahan internal (Weaknesses) dalam tata kelola pajak, peluang eksternal (Opportunities) seperti dukungan teknologi dan regulasi yang memihak, serta ancaman eksternal (Threats) seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan fiskal. Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang terukur dan implementatif bagi Pemerintah Kota Baubau untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa pajak daerah merupakan sumber pendanaan utama bagi program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Baubau. Peningkatan penerimaan pajak akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, optimalisasi penerimaan pajak juga akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau pasca pandemi COVID-19.

Studi Literatur

Teori Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Efektivitas pemungutan pajak daerah adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah direncanakan. Mardiasmo (2004) menyatakan efektivitas merupakan kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang optimal sesuai target. Zaidan Nawawi (2012) menekankan bahwa efektivitas organisasi dalam pemungutan pajak terdiri dari efektivitas individu (kompetensi dan kesadaran petugas), efektivitas kelompok (koordinasi antar petugas dan instansi), serta efektivitas organisasi (kebijakan dan sistem yang mendukung kepatuhan wajib pajak).

Dalam konteks Kota Baubau, efektivitas pemungutan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh pembaruan data wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, serta peran aktif aparatur kecamatan dan kelurahan dalam sosialisasi pajak. Turmuji et al. (2022) menegaskan bahwa pendekatan langsung dan rutin oleh camat dan lurah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mempercepat pemutakhiran data, dan mengurangi tunggakan pajak, yang selama ini menjadi kendala utama pengelolaan pajak daerah.

Pajak Daerah: Definisi, Fungsi, dan Sistem Pemungutan

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum daerah (Soemitro, 1990; Feldman dalam Resmi, 2019). Pajak memiliki dua fungsi utama: fungsi budgeter (sebagai sumber pendanaan utama pemerintah daerah) dan fungsi regulend (alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial di daerah) (Mardiasmo, 2018).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari official assessment system, self assessment system, dan withholding system (Resmi, 2019). Di tingkat daerah, self assessment system semakin diutamakan seiring digitalisasi dan transparansi pelayanan, termasuk di Baubau yang telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara digital untuk mempermudah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peran Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain (UU No. 28 Tahun 2009; Abdul Halim, 2007). Pajak daerah merupakan komponen terbesar dan paling potensial dalam struktur PAD. Menurut Rudy Badrudin (2011), semakin besar kontribusi PAD, semakin mandiri pula keuangan daerah.

Di Kota Baubau, kontribusi pajak daerah terhadap PAD terus diupayakan optimal melalui revisi tarif pajak dan penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Baubau telah melakukan penyesuaian tarif pada berbagai jenis pajak daerah, seperti PBB-P2, BPHTB, PKB, dan lainnya, untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Analisis SWOT dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi optimalisasi pajak daerah. David (2011) menyebutkan bahwa SWOT membantu organisasi merumuskan strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Studi di Provinsi Riau menunjukkan strategi SO (Strength-Opportunity) dapat diterapkan dengan meningkatkan kualitas SDM, memperluas basis pajak, memperkuat sosialisasi, dan digitalisasi pembayaran pajak.

Di Baubau, penerapan analisis SWOT juga digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pembenahan struktur administratif, peningkatan keterampilan staf, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di berbagai daerah lain dan relevan untuk diterapkan di Baubau.

Studi Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait optimalisasi pajak daerah di Indonesia. Mariana Sampur (2021) di Sidoarjo menemukan efektivitas pemungutan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan sistem administrasi yang baik, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Di Baubau sendiri, Turmuji et al. (2022) menyoroti pentingnya digitalisasi pembayaran pajak dan peran aktif aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penyesuaian tarif pajak yang dilakukan pemerintah Baubau juga menjadi strategi penting untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi pasca pandemi.

Studi lain di Provinsi Riau (2017) menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, sosialisasi, dan perluasan basis pajak dalam strategi optimalisasi pajak daerah berbasis SWOT. Temuan-temuan ini menjadi referensi penting dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Baubau.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Baubau. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah pasca pandemi COVID-19 melalui analisis SWOT. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena, proses, dan dinamika kebijakan perpajakan secara komprehensif berdasarkan data asli dan temuan lapangan.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang valid serta dapat diverifikasi.

- Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yaitu pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau, pegawai KPP Pratama Baubau, aparatur kecamatan/kelurahan, serta wajib pajak daerah yang dipilih secara purposive.
- Data sekunder berupa dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Baubau tahun 2022–2024, laporan kinerja Bapenda, data statistik pajak daerah, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau dan dokumen kebijakan terkait lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara langsung kepada informan kunci untuk menggali strategi, kendala, dan peluang optimalisasi pajak daerah di Kota Baubau.
2. Observasi Lapangan: Peneliti melakukan observasi terhadap proses pemungutan, pelayanan, dan administrasi pajak di kantor Bapenda serta di kecamatan/kelurahan.
3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti laporan realisasi PAD, data penerimaan pajak, serta dokumen kebijakan dan peraturan daerah terkait perpajakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Menyaring dan memilih data relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks untuk memudahkan analisis SWOT.
3. Analisis SWOT:

- **Internal Factor Evaluation (IFE):** Mengidentifikasi dan menilai kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) internal pengelolaan pajak daerah.
- **External Factor Evaluation (EFE):** Mengidentifikasi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) eksternal yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah.
- **Penyusunan Matriks SWOT:** Mengkombinasikan faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi optimalisasi yang paling relevan dan aplikatif bagi Kota Baubau.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) dan triangulasi teknik, serta validasi hasil wawancara dengan data dokumen resmi. Seluruh data yang digunakan merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumber resmi pemerintah daerah dan hasil penelitian lapangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Ringkasan Alur Penelitian

1. Studi pendahuluan dan penentuan informan kunci
2. Pengumpulan data primer dan sekunder
3. Analisis data menggunakan pendekatan SWOT
4. Penyusunan rekomendasi strategi optimalisasi pajak daerah Kota Baubau

Metode ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang berbobot, valid, dan relevan dengan kebutuhan kebijakan fiskal Kota Baubau pasca pandemi COVID-19.

Hasil

Gambaran Umum Penerimaan Pajak Daerah Kota Baubau Pasca Pandemi

Data resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 mencapai Rp124,1 miliar atau 99,82% dari target Rp124,4 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak daerah terealisasi sebesar Rp37 miliar atau 82,35% dari target Rp45 miliar, sedangkan retribusi daerah hanya mencapai Rp6,4 miliar atau 61,09% dari target Rp10,5 miliar. Capaian ini mengindikasikan adanya gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, terutama pada sektor-sektor strategis seperti PBB-P2 dan retribusi daerah, yang masih belum optimal kontribusinya terhadap PAD.

Kategori	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
PAD (Total)	2023	135.309.387.604	38.010.000.000 (Bapenda-specific)	28.09% (Bapenda-specific)
	2024	124.410.000.000	124.100.000.000	99.82%
Pajak Daerah	2023	43.800.000.000	N/A (component of Bapenda-specific PAD)	N/A

	2024	45.050.000.000	37.000.000.000	82.35%
PBB (Efektivitas)	2023	9.512.261.489	6.458.105.050	67.89%
Retribusi (Efektivitas)	2023	708.990.000	603.626.000	85.14%

Permasalahan Utama dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Permasalahan klasik yang dihadapi Kota Baubau antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya angka tunggakan, serta kebocoran penerimaan akibat proses administrasi yang belum sepenuhnya transparan dan masih rentan manipulasi data. Studi KPP Pratama Baubau juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan hanya 65%, jauh dari ideal. Selain itu, sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat masih terbatas, sehingga kesadaran dan partisipasi aktif wajib pajak belum maksimal. Sistem administrasi yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh menambah tantangan dalam pemutakhiran data dan pengawasan lapangan.

Inovasi dan Strategi Optimalisasi: Implementasi Sistem Digital dan Pendekatan SWOT

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kota Baubau telah melakukan inovasi pengelolaan pajak daerah melalui digitalisasi pembayaran dan administrasi. Implementasi sistem digital, seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak, telah mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pemutakhiran data wajib pajak. Pendekatan langsung dan rutin oleh camat dan lurah dalam sosialisasi serta pemutakhiran data terbukti efektif menurunkan angka tunggakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penyesuaian tarif pajak daerah juga dilakukan secara selektif, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Misalnya, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1,5%, PBB-P2 sebesar 0,1% dari NJOP, BPHTB sebesar 5%, PBJT sebesar 10%, pajak reklame sebesar 25%, pajak air tanah sebesar 20%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15%, dan pajak sarang burung walet sebesar 10%. Penyesuaian ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan

Analisis SWOT Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Baubau

1. Kekuatan (Strengths)

- **Implementasi Sistem Digital Terpadu**

Pemerintah Kota Baubau telah mengimplementasikan sistem pembayaran pajak berbasis QRIS dan platform digital terpadu yang memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kebocoran pajak (Turmuji et al., 2022).

- **Peran Aktif Camat dan Lurah**

Camat dan lurah berperan sebagai ujung tombak dalam sosialisasi dan pendataan wajib pajak di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pendekatan langsung dan rutin mereka membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mempercepat pemutakhiran data pajak, yang selama ini menjadi kendala utama (La Ode Fasikin, Pj Sekda Kota Baubau).

- **Penyesuaian Tarif Pajak yang Responsif**

Pemerintah Kota Baubau melakukan revisi tarif pajak daerah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi lokal, sehingga tarif yang diberlakukan cukup adil dan tidak memberatkan wajib pajak, misalnya tarif PKB 1,5%, PBB-P2 0,1%, dan pajak reklame 25%.

- **Ketersediaan Data dan Dokumentasi Resmi**

Tersedianya data realisasi penerimaan pajak dan dokumen kebijakan yang lengkap memudahkan analisis dan evaluasi kebijakan perpajakan daerah secara akurat dan berbasis bukti.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- **Keterbatasan Infrastruktur dan Literasi Digital**

Meskipun sistem digital sudah diterapkan, masih terdapat keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah serta rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak tertentu, terutama di daerah pedesaan, yang menghambat optimalisasi sistem digital (Turmuji et al., 2022).

- **Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak masih di bawah target, dengan angka kepatuhan pelaporan SPT tahunan sekitar 65%. Hal ini menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan (KPP Pratama Baubau).

- **Sistem Administrasi yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi**

Beberapa proses administrasi pajak masih manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem digital, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kesalahan pencatatan.

- **Kapasitas SDM yang Perlu Ditingkatkan**

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan pajak dan teknologi informasi menjadi hambatan dalam pengelolaan pajak yang optimal.

3. Peluang (Opportunities)

- **Dukungan Kebijakan Nasional dan Digitalisasi**

Pemerintah pusat mendorong digitalisasi pelayanan publik dan desentralisasi fiskal, membuka peluang bagi Kota Baubau untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak secara lebih efektif dan efisien (Putri & Widodo, 2022).

- **Potensi Ekonomi Lokal yang Meningkat**

Kota Baubau memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, yang dapat menjadi basis pajak baru jika didata dan dikelola dengan baik.

- **Kesadaran Masyarakat yang Meningkat**

Dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif oleh camat dan lurah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah semakin meningkat, membuka peluang peningkatan kepatuhan pajak.

- **Integrasi Sistem Pembayaran Pajak**

Penyederhanaan administrasi melalui sistem pembayaran terpadu memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran berbagai jenis pajak sekaligus, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan yang dapat mendorong peningkatan penerimaan.

4. Ancaman (Threats)

- **Dampak Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19**

Pemulihan ekonomi yang belum merata menyebabkan daya beli masyarakat masih terbatas, sehingga berpotensi menurunkan kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

- **Perubahan Regulasi Fiskal Nasional**

Kebijakan fiskal dan perpajakan di tingkat nasional yang dinamis dan terkadang berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan adaptasi bagi pemerintah daerah dan wajib pajak.

- **Potensi Kebocoran dan Penyalahgunaan Wewenang**

Jika sistem pengawasan dan kontrol internal belum optimal, potensi manipulasi data dan kebocoran penerimaan pajak masih tinggi, meskipun sudah ada sistem digital.

- **Kesenjangan Infrastruktur Digital Antar Wilayah**

Perbedaan akses dan kualitas infrastruktur digital antara pusat kota dan wilayah pinggiran dapat menyebabkan disparitas dalam penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Analisis SWOT menunjukkan bahwa Kota Baubau memiliki kekuatan signifikan berupa sistem digital yang sudah berjalan dan peran aktif aparaturnya serta lurah dalam pengelolaan pajak. Namun, kelemahan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan SDM harus segera diatasi. Peluang dari dukungan kebijakan nasional dan potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal dengan strategi yang tepat, sementara ancaman dari dampak ekonomi pasca pandemi dan perubahan regulasi harus diantisipasi melalui kebijakan adaptif dan penguatan pengawasan.

Strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat digitalisasi dan pelatihan SDM, memperluas basis pajak melalui pendataan dan sosialisasi intensif, serta meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Rekomendasi Strategi Optimalisasi

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan temuan lapangan, strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Baubau meliputi:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak melalui pendataan objek dan subjek pajak baru secara digital,
- Penguatan koordinasi antar-instansi, khususnya antara Bapenda, kecamatan, kelurahan, dan KPP Pratama,
- Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam administrasi, pembayaran, dan pengawasan pajak,
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparaturnya,
- Sosialisasi dan edukasi pajak secara masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak.

Strategi-strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di berbagai kota dan sangat relevan untuk diterapkan di Kota Baubau dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Baubau pasca pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan pendekatan SWOT. Kota Baubau memiliki kekuatan berupa implementasi sistem digital terpadu dan peran aktif aparaturnya serta kelurahan dalam sosialisasi dan pendataan wajib pajak, namun masih menghadapi kelemahan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain dukungan kebijakan nasional untuk digitalisasi pelayanan publik dan potensi pertumbuhan ekonomi lokal, sedangkan ancaman utama berasal dari dampak ekonomi pasca pandemi dan perubahan regulasi fiskal yang dinamis. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pajak daerah yang efektif harus mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Baubau memperkuat digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait serta memperluas sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah juga harus responsif terhadap perubahan regulasi fiskal nasional dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak daerah Kota Baubau dapat meningkat secara signifikan, mendukung kemandirian fiskal, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Referensi

- Adinda. (2024). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*. IAIN Palopo.
- Anwari, A. (n.d.). *Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau*. Perpustakaan STAN.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau. (2023). *APBD Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023*.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. (2024, Februari). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023*.
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2024, April 4). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Baubau Menurut Lapangan Usaha 2019-2023*.
- Da'a, F. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Daring Kota Baubau. *GALANGI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis)*, 1(1).
- DDTC News. (2024, Desember 18). *Opsen PKB Hingga PBB-P2, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kota Baubau*.
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau. (2021, Agustus). *Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2019-2023*.
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau. (2023, Oktober). *Untitled - Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau* (Laporan akhir kegiatan "Penyusunan Strategi Promosi Investasi Kota Baubau").
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1).
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini. (2024). Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis Di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962–969.
- Lase, F. F. (n.d.). *Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Eprints IPDN.
- Maabuat, E. E., Sutiyo, & Kurniawati, L. (2022). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Khatulistiwa*, 5(2), 118–129.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Nabila, I. A. (2023). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*. Eprints IPDN.
- Oktafiah, N., Rahmawati, & Abidin, Z. (2023). Akuntabilitas Publik dalam Penggunaan Alat Perekam Pajak Online di Kota Baubau. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 25–33.
- Pemerintah Kota Baubau. (2023, November 25). *RAPBD Kota Baubau 2024 Sinergi dengan Arahkan Presiden*.
- Priyanto, R., & Utomo, R. (2018). Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Implementasi Pelatihan Perpajakan Bagi Pengambil Keputusan. *Sembadha*, 1(1).
- Sari, E. G. (2024). Evaluasi Penerimaan, Laju Pertumbuhan dan Peramalan PBB-P2 di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 41-50. <https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7621>

- Sari, S. R., & Mustaqim, F. (n.d.). Analisis Efektivitas Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau). *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 6(1).
- Setkab.go.id. (2021, Agustus 5). *BPS: Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021 Tumbuh 7,07 Persen*.
- Sulistyo. (2023). *Strategy for Increasing Regional Original Income Through the Tax Sector at the Regional Revenue Agency for Bontang City*.. Library Fisip Unmul.
- Syasiraka, M. A. (2021). *Analisis Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lombok Barat (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat)*.. Repository UB.
- Toyota Astra Motor. (n.d.). *Tarif Baru PKB dan BBNKB DKI Jakarta, Daerah Lain Berbeda Tergantung Kebijakan Pemda, Segera Beli Mobil Baru Toyota Bulan Ini*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wikipedia. (n.d.). *Baubau*. Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Baubau>
- Zakya HS, I., Harahap, H., Bangun, R., & Yurnalis. (n.d.). Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. *Iptekin*, 21(1).
- Zarta. (2009). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bau-Bau*.. Repository UT.
- Zulfikar, A., Harianto, & Hutagaol, M. P. (2023). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 15(2).